

**MONITORING PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU
(STUDI TUJUAN PERTAMA KEMISKINAN DI KOTA PEKANBARU)**

Ghina Sonia¹ dan Eko Handrian²

¹ dan ²Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nasution, No 113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Riau 28284

Email : ghinasonia@student.uir.ac.id¹ dan ekohandrian@soc.uir.ac.id²

ABSTRAK

Monitoring pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan ialah mengamati perkembangan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target. Penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan cara analisis deskriptif dan menggunakan metode triangulasi. Adapun faktor-faktor yang menghambat monitoring pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu : sumber daya manusia, anggaran, sumber daya waktu, ketidaktersediaan laporan yang memadai, koordinasi dan kerjasama antar instansi. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa monitoring pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan oleh badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan provinsi riau (studi tujuan pertama kemiskinan di Kota Pekanbaru) sudah terlaksana tetapi belum optimal hal ini terkait dengan ketepatan waktu pelaksanaan monitoring dan terbatasnya sumber daya dalam melakukan monitoring.

Kata Kunci : Monitoring, Pelaksanaan, Tujuan Pembangunan Berkelanjut.

ABSTRACT

Monitoring the implementation of sustainable development goals is observing progress in achieving sustainable development goals from time to time to measure progress in achieving targets. This research was conducted at the Research and Development Regional Development Planning Agency of Riau Province. This type of research uses qualitative research methods with data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The data analysis technique in this research is descriptive analysis and uses the triangulation method. The factors that hinder monitoring the implementation of sustainable development goals are: human resources, budget, time resources, unavailability of adequate reports, coordination and cooperation between agencies. Based on the results of this research, monitoring of the implementation of sustainable development goals by the regional development planning agency for research and development in Riau Province (study of the first objective of poverty in Pekanbaru City) has been carried out but is not optimal, this is related to the timeliness of implementing monitoring and limited resources in carrying out monitoring.

Keywords : Monitoring, Implementation, Sustainable Development Goals.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara besar yang tergolong banyak penduduknya dan wilayah kekuasaannya sangat luas. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara berkembang Indonesia mempunyai tujuan untuk menyejahterakan seluruh rakyatnya dari Sabang sampai Marauke, dari pusat hingga pelosok tanah air, dari kota hingga perdesaan.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di Indonesia adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin, pembangunan di Indonesia saat ini sedang dihadapkan terhadap masalah kemiskinan. Pada umumnya di Negara berkembang seperti Indonesia permasalahan pendapatan yang rendah dengan masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Tujuan dilaksanakannya pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan.

Pemerintah Indonesia secara berkesinambungan terus melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui serangkaian penanganan permasalahan fakir miskin dalam rangka memberdayakan keluarga miskin, karena fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara oleh Negara (UUD RI 1945 pasal 34).

Kemiskinan adalah keadaan dimana

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Permasalahan standar hidup yang rendah berhubungan dengan pendapatan yang rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran.

Provinsi Riau sendiri masih memiliki masalah kemiskinan termasuk Kota Pekanbaru. Penduduk miskin yang ada di Kota Pekanbaru kebanyakan tinggal di pinggiran Kota, tinggal di lingkungan kumuh, mempunyai tempat tinggal seadanya, upah pendapatan yang di dapat tidak sesuai dengan besarnya pengeluaran, banyak pengangguran, yang mengakibatkan masih banyaknya penduduk miskin di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru yang sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat membuat orang banyak untuk tinggal dan berusaha untuk hidup di dalamnya. Pemerintah juga telah banyak menerapkan program-program pembangunan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Namun, program-program ini belum memiliki strategi dan kebijakan yang tepat karena tidak langsung berpihak pada lapisan masyarakat yang paling miskin, tetapi hal ini membuktikan bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2015	33,76	3,27
2016	32,49	3,07
2017	33,09	3,05
2018	31,62	2,85
2019	28,60	2,52
2020	30,40	2,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2021

Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa perubahan jumlah penduduk miskin di kota pekanbaru bersifat fluktuatif. Dimana sempat terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2019 yaitu 28,60 jiwa tetapi kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 30,40 ribu jiwa. Dengan melihat jumlah penduduk miskin dan juga persentase penduduk miskin yang cukup tinggi, dapat dinilai bahwa pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru masih dinilai belum baik.

Kasus kemiskinan pada Kota Pekanbaru bukan merupakan kasus yang baru lagi, persoalan ini sudah menjadi persoalan yang mendasar di bahas oleh Negara begitu juga Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau.

Pada poin pertama 17 tujuan SDGs adalah tanpa kemiskinan (*No Poverty*), sedangkan kemiskinan sudah menjadi fenomena sepanjang sejarah kemanusiaan. Indonesia sebagai salah satu Negara yang kaya sumber daya alamnya namun tidak terlepas dari persoalan kemiskinan, akibat adanya salah memahami dan mengurus kemiskinan.

Dilihat dari tabel diatas bahwa pentingnya melakukan pengentasan kemiskinan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimana merupakan dari *goal's* satu yaitu penghapusan kemiskinan, maka pilar sosial adalah salah satu pilar penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau, karena menyangkut kualitas kehidupan manusia.

Dengan adanya tujuan menyelesaikan masalah kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender maka tercapainya tujuan tersebut akan memperoleh manusia yang berkualitas. Sehingga akan berdampak pada percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan pembangunan pada pilar

sosial dilakukan oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDALITBANG Provinsi Riau. Bidang Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia ini bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) pada pembangunan pilar sosial.

Pemerintah meluncurkan perpres TPB/SDGs melalui integrasi 94 dari 169 target TPB/SDGs ke dalam RPJMN 2015-2019 dan penerbitan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah membuktikan komitmen dan keseriusannya pada Tujuan SDGs (Kementrian PPN/ Bappenas, 2017).

Komitmen dalam mengimplementasikan SDGs di Provinsi Riau secara penuh di daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang sejalan dengan pelaksanaan visi pembangunan daerah. Pelaksanaan di tingkat daerah dan komitmen pencapaian SDGs dirumuskan ke dalam dokumen RAD yang penyusunannya dilakukan secara bersama-sama antara Gubernur dan Bupati/Walikota dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan yaitu organisasi masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya.

Amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB/SDGs dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Perpres 59/2017. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 17 ayat 2 Perpres 59/2017.

Menindaklanjuti hal tersebut, Provinsi Riau sudah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs tahun 2017-2019 melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2018, dan Provinsi Riau merupakan yang pertama di Indonesia menerbitkan RAD SDGs. RAD SDGs ini sudah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau dan dalam implementasinya Pemprov Riau melibatkan Kabupaten/Kota dan sejumlah *stakeholders*. (R. Ahmad Rahim, 2018).

Hasil RAD SDGs Provinsi Riau tahun 2017-2019 yang pertama yaitu perencanaan pembangunan dan anggaran sudah sejalan dengan SDGs. Kedua, prioritas utama tujuan SDGs di Provinsi Riau adalah kemiskinan, pendidikan berkualitas, kehidupan sehat dan sejahtera. Ketiga, beberapa hal yang harus menjadi perhatian yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, ketidakmerataan, hunian yang layak, sanitasi dan penanganan kawasan kumuh, pengelolaan lingkungan (Riau Hijau), pendidikan dasar dan menengah dan industri manufaktur serta downstream industri berbasis pertanian dan perkebunan. Keempat, dalam upaya mencapai target SDGs 2030, maka berbagai Program Pembangunan dalam RPJMD 2019-2024 agar dirancang sesuai dengan Indikator Baseline SDGs dengan pengalokasian anggaran yang proporsional. (R. Ahmad Rahim, 2018).

Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs bersama seluruh pihak terkait di Kota Pekanbaru merupakan program untuk melakukan lompatan dengan cepat angka kemiskinan. Program ini diharapkan bisa menekan angka kemiskinan dengan cepat dan menekan kesenjangan sosial di daerah. Lalu memberikan kesempatan kepada penduduk miskin untuk mendapatkan akses ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Untuk melaksanakan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) secara inklusif, sistematis dan transparan telah tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai amanah dari Perpres tersebut, Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai bentuk nyata dari komitmen Indonesia dalam melaksanakan TPB ditingkat nasional telah disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs sedangkan pada tingkat daerah telah disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Untuk mengetahui pelaksanaan pencapaian sasaran TPB/SDGs, praktik baik serta permasalahan yang ditemui maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAN dan RAD TPB/SDGs sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program-program RAN maupun RAD yang dibiayai yang bersumber dari APBN, APBD maupun nonpemerintah.

Dalam monitoring tentu saja ada beberapa hal yang dimonitoring yaitu target atau tujuan yang dicapai dari kegiatan, kaitan antara indikator dan nomenklatur, serta program atau kegiatan

kaitkan dengan masing-masing SDGs.

Dari penjelasan diatas tentang monitoring pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan oleh bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Provinsi Riau, ditemukan beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Berdasarkan wawancara sekertaris bidang pemerintah dan pembangunan manusia tim kelompok kerja pilar sosial, dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan yang seharusnya 6 bulan sekali tetapi hanya dilakukan setiap 1 tahun sekali.
2. Dari hasil wawancara sekertaris bidang pemerintah dan pembangunan manusia, bahwa kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pelaksanaan monitoring.
3. Masih terdapat kelemahan dalam melakukan monitoring karena tidak ada sanksi khusus yang diberikan kepada kelompok kerja yang tidak melaksanakan SDGs *goals* satu kemiskinan.

Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendaya gunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Silalahi. (dalam Zulkifli, 2014 : 11).

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Zulkifli, 2005 : 19) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Hadari Nawawi (dalam Iriawan dan Beddy, 2017 : 18) administrasi adalah kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu

karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekali tugas tempat berlangsung berbagai macam aktivitas bagi pencapaian tujuan sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian rangka suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan. (Siagian, 2015 : 139).

Hakikatnya organisasi itu dilihat dari sudut pandang. Pertama, organisasi di pandang sebagai “wadah” dan organisasi dipandang sebagai “proses” dimana ketika organisasi di pandang sebagai wadah maka organisasi merupakan tempat dimana kegiatan-kegiatan administratif dan manajemen dijalankan. Kedua, organisasi dipandang sebagai proses maka organisasi akan menyoroti interaksi antara orang-orang didalam organisasi itu. (Siagian, 2015 : 96).

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Menurut G. R Terry (dalam Sukarna, 2010 : 3) pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin Usman, 2002 : 70) mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Sedangkan Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa

pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Mazmanian dan Sebatier (dalam Solihin Abdul Wahab, 2008 : 68) merumuskan proses pelaksanaan (implementasi) sebagai berikut : "Implementasi (pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Lazimnya dapat dikatakan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini langsung setelah melewati tahapan tertentu, biasanya diawali dengan pengesahan undang-undang, kemudian pelaksanaan oleh kelompok sasaran. Dampak nyata baik dikehendaki atau tidak dari hasil pelaksanaan tersebut dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan).

Menurut Bintaro Tjokroadmudjojo (dalam Rahardjo Adisasmita, 2011 : 24) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program proyek. Menurut Santoso Sastropetro (1982 : 183) pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Wiestra, dkk (dalam Rahardjo Adisasmita, 2011 : 24) mengemukakan pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu

dimulainya. Menurut Sondang P. Siagian (dalam Rahardjo Adisasmita, 2011 : 24) pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pada dasarnya *sustainable development* merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. (Budihardjo, 2010).

Sustainable development dalam aktivitasnya memanfaatkan seluruh sumber daya, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami (sumber daya alam hayati dan non hayati) dan lingkungan binaan (sumber daya manusia dan buatan), sehingga sifat interaksi maupun interdependensi antar keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. (Fauzi, 2004). Dalam kaitan ini, eksplorasi maupun eksploitasi komponen-komponen sumber daya alam untuk pembangunan, harus seimbang dengan hasil produk bahan alam dan pembuangan limbah ke alam lingkungan. Prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar dari

setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan keberlanjutan fungsi alam semesta.

Menurut Permana (dalam Fauzi, 2004) setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, menyangkut alasan moral. Kedua, menyangkut alasan ekologi. Ketiga, menyangkut alasan ekonomi. Dimensi ekonomi keberlanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi.

Marjuki dan Suharto mengatakan monitoring adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan cara mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan.

Menurut William Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi yaitu :

1. Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf dan semua yang terlibat mengikuti standard dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
3. Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
4. Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara

perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Menurut Edi Suharto monitoring pada dasarnya merupakan pemantauan suatu kegiatan proyek atau program sosial yang dilaksanakan pada saat kegiatan tersebut sedang berlangsung.

Menurut Nalahudin Muhlisin monitoring merupakan suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termaksud mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan atau program itu berjalan sesuai dengan rencana sehingga masalah yang dilihat atau ditemui dapat diatasi.

Monitoring menyelesaikan permasalahan menggunakan data dasar yang tersedia, sedangkan evaluasi dapat dilakukan setelah memperoleh hasil dari monitoring yang kemudian akan dibandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Oleh sebab itu antara evaluasi dan monitoring tidak boleh dipisahkan. (Widiarto, 2012).

Menurut Moerdiyanto (2009) monitoring merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memonitor jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam monitoring dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan.

Monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan. (Mercy, 2015).

Monitoring ditinjau dari hubungan terhadap manajemen kinerja adalah proses terintegrasi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana. Monitoring dapat memberikan informasi berupa proses untuk menetapkan langkah menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan. Level kajian

monitoring mengacu pada kegiatan per kegiatan dalam suatu bagian. (Wrihatnolo, 2018).

Menurut Harry Hikmat (2010) monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi yang berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan berkelanjutan tentang kegiatan/program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/kegiatan itu selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami atau mendeskripsikan fenomena yang sedang terjadi secara alamiah. Penelitian kualitatif deskriptif bersifat menggambarkan dan mendeskripsikan sesuatu hal yang didapat dari lapangan dan kemudian dikembangkan dengan ilmiah. Alasan penulis menggunakan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta atau bukti yang akurat melalui wawancara narasumber sesuai dengan permasalahan secara menyeluruh tentang monitoring pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan oleh Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama Kemiskinan Kota Pekanbaru).

Penentuan subjek dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu. Informan merupakan orang yang terlibat secara langsung serta berinteraksi sosial dan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Key informan adalah orang yang mengetahui dan mempunyai berbagi informasi pokok yang diperlukan peneliti.

Teknik analisis data yang digunakan

oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan analisis secara deskriptif dan menggunakan metode triangulasi, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui monitoring pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan oleh Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau dalam penelitian ini dinilai berdasarkan empat indikator yang terdiri dari indikator ketaatan, pemeriksaan, laporan dan penjelasan.

1. Ketaatan

Monitoring berdasarkan indikator ketaatan dalam konteks pembangunan berkelanjutan melibatkan pemantauan dan evaluasi sejauh mana pihak-pihak yang terlibat mematuhi atau memenuhi komitmen dan target yang telah ditetapkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Indikator ketaatan digunakan untuk mengukur sejauh mana kegiatan dan kebijakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Indikator ketaatan ini di ukur berdasarkan ketepatan periode waktu dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

a. Periode Waktu

Periode waktu monitoring mengacu pada jangka waktu atau rentang waktu dimana kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan atau program pembangunan lainnya, periode waktu monitoring dapat berbeda-beda tergantung pada konteks, skala, dan sasaran yang ingin dipantau.

Mengenai periode waktu menunjukkan bahwa kegiatan monitoring sudah berjalan sesuai prosedur, namun terdapat kendala dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan di

bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, terutama terkait dengan *Goals* Satu (tanpa kemiskinan) di Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah perbaikan dan pemantauan berkelanjutan untuk mengatasi kendala tersebut dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, kegiatan monitoring pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) oleh pemerintah dan sektor pembangunan manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Litbang Provinsi Riau khususnya pada tujuan tanpa kemiskinan di Kota Pekanbaru, tidak selalu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Misalnya, laporan lembaga tentang implementasi *SDGs* untuk tahun 2021 diterbitkan pada tahun 2022, yaitu satu tahun setelah berakhirnya periode pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut mungkin tidak melakukan kegiatan pemantauannya secara tepat waktu. Selain itu, penjelasan lembaga mengenai kemajuannya dalam mengimplementasikan *SDGs* terkadang terbatas cakupannya dan tidak selalu jelas atau transparan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut mungkin tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan untuk memahami kemajuan *SDGs*.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. SOP ini dirancang untuk

memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam mengawasi dan menilai langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari SOP ini adalah untuk memastikan bahwa semua proses dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan tepat, transparan, dan akuntabel.

Bappedalitbang Daerah Provinsi Riau terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) menunjukkan bahwa secara keseluruhan, SOP pemantauan *SDGs* tujuan pertama oleh Bappedalitbang merupakan landasan yang baik untuk pemantauan yang efektif. Namun, ada ruang untuk perbaikan dalam penerapan SOP. Bappedalitbang harus terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan untuk pemantauan, analisis data, dan pelaporan hasil pemantauan. Dengan demikian, Bappedalitbang dapat memastikan bahwa pemantauan digunakan untuk memantau kemajuan pencapaian *SDGs* secara efektif.

Berdasarkan hasil observasi penelitian terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada indikator ketaatan bahwa pada dasarnya monitoring pelaksanaan *SDGs* tujuan pertama tanpa kemiskinan telah terlaksana cukup baik, namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pemantauan *SDGs* tujuan pertama tanpa kemiskinan oleh Bappedalitbang Provinsi Riau yang tidak berjalan sesuai SOP. Hal ini disebabkan oleh Bappedalitbang Provinsi Riau tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pemantauan *SDGs* secara efektif. Ini termasuk kurangnya dana, staf, dan sosialisasi serta kurangnya koordinasi antara Bappedalitbang Provinsi Riau dengan instansi pemerintah lainnya yang terlibat dalam pemantauan *SDGs*. Hal ini mempersulit pengumpulan dan pembagian data, serta untuk mengembangkan dan menerapkan

kebijakan dan program yang efektif.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan terkait pelaksanaan monitoring tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kegiatan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan untuk memeriksa sejauh mana tujuan dan indikator pembangunan berkelanjutan telah diimplementasikan dan dicapai. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai ketaatan, efektivitas, dan dampak pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan.

a. Sumber dan Layanan

Ada sejumlah sumber daya dan layanan yang tersedia untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya memeriksa pelaksanaan pemantauan *SDGs*. Sumber daya dan layanan ini dapat membantu meningkatkan kualitas pemantauan, mengidentifikasi bidang-bidang yang membutuhkan tindakan lebih lanjut, dan melacak kemajuan menuju pencapaian *SDGs*.

Bappedalitbang Provinsi Riau menyediakan sejumlah sumber daya dan layanan untuk memantau pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) pada pilar tujuan sosial tanpa kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi kemiskinan di Kota Pekanbaru, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan *SDGs* terkait kemiskinan serta Bappedalitbang memberikan peningkatan kapasitas kepada pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya tentang *SDGs* terkait kemiskinan. Ini membantu untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan tujuan secara efektif.

Hasil observasi yang peneliti lakukan adalah terkait sumber daya dan layanan bahwa masih terdapat kelemahan instansi yaitu untuk menjamin kehidupan yang

sejahtera serta untuk mendorong tercapainya tujuan tanpa kemiskinan dalam bentuk apapun disegala penjuru. Namun sampai saat ini mereka masih ragu menentukan sumber daya dan layanan seperti apa kemiskinan tersebut dikarenakan instansi tersebut masih belum menentukan kategori kemiskinan itu sendiri seperti apa.

b. Target

Diketahui bahwa dalam hal mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pertama tanpa kemiskinan di Kota Pekanbaru secara umum sudah tercapai dengan baik, seperti halnya data pencapaian utama Kota Pekanbaru dalam hal pengentasan kemiskinan berdasarkan keterangan dari Bappedalitbang Provinsi Riau diantaranya :

1. Tingkat kemiskinan telah berkurang dari 12,6% pada tahun 2014 menjadi 7,9% pada tahun 2022.
2. Jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan berkurang lebih dari 100.000 orang.
3. Kota Pekanbaru telah melaksanakan sejumlah program untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, seperti program keuangan mikro, program pelatihan kerja, dan program bantuan sosial.

Adapun hasil observasi penelitian adalah terkait target ini ialah setiap instansi pelaksana seperti Dinas Sosial masih ada yang tidak mengenai target dengan salah satunya yaitu kemiskinan, dari data Dinas Sosial kemiskinan sudah tampak berkurang. Namun Dinas Sosial menyatakan pendapatan yang rendah itu bukan salah satu target dari kemiskinan. Kemiskinan yang tidak punya pendapatan adalah salah satu target untuk mencapai tujuan pembangunan tanpa kemiskinan. Serta masih ada kurangnya pemahaman dari masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial itu sendiri.

3. Laporan

Laporan dalam monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

a. Informasi

Laporan monitoring memberikan sumber informasi yang berharga tentang keadaan kemiskinan dan kemajuan yang telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir. Ini juga merupakan alat yang berguna untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang masih perlu dilakukan dan untuk merekomendasikan perubahan kebijakan untuk meningkatkan implementasi.

Dapat diketahui bahwa Bappedalitbang Provinsi Riau berharap laporan dari monitoring pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan pertama tanpa kemiskinan dapat memberikan informasi berharga mengenai kondisi kemiskinan yang ada di Provinsi Riau. Informasi dari laporan tersebut akan digunakan oleh Bappedalitbang Provinsi Riau untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan program untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Riau. Laporan ini juga akan digunakan untuk meningkatkan dalam tujuan pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat dan pembangunan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Bappedalitbang Provinsi Riau dan dinas terkait di Kota Pekanbaru menghadapi beberapa kendala dalam memperoleh informasi dari monitoring pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, terutama pada tujuan pertama yaitu pengentasan kemiskinan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya aksesibilitas dan keterbatasan data yang akurat. Penting bagi Bappedalitbang dan dinas terkait untuk memiliki data yang lengkap dan terupdate mengenai kemiskinan di Kota Pekanbaru.

Namun, seringkali data yang ada tidak lengkap, tidak terkini, atau sulit diakses. Hal ini dapat menghambat upaya monitoring dan evaluasi yang efektif, sehingga sulit untuk mengetahui sejauh mana tujuan pengentasan kemiskinan telah tercapai. Selain itu, kurangnya koordinasi antarinstansi juga menjadi kendala yang signifikan. Bappedalitbang Provinsi Riau dan dinas terkait di Kota Pekanbaru perlu bekerja sama dalam mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Namun, seringkali terjadi kurangnya koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait. Hal ini dapat menghambat aliran informasi yang efisien dan dapat menyebabkan kesalahan atau duplikasi dalam pengumpulan data.

b. Hasil Perubahan Sosial

Program pembangunan berkelanjutan di Kota Pekanbaru telah memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Melalui program ini, banyak anak-anak dari keluarga miskin yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan, kini dapat mengenyam pendidikan yang layak. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, tetapi juga membuka peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Hasil observasi secara keseluruhan, proses pemantauan menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Bappedalitbang dan dinas terkait di Kota Pekanbaru memiliki sejumlah kendala dalam mencapai hasil perubahan sosial setelah memantau pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan pertama mengentaskan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Kendala tersebut meliputi sumber daya yang terbatas, tantangan dalam pengumpulan dan analisis data, tantangan dalam kesadaran

dan keterlibatan publik, serta tantangan dalam koordinasi dan kolaborasi.

4. Penjelasan

Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

a. Dampak Kebijaksanaan

Tujuan dilakukannya monitoring tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan inisiatif yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut memiliki dampak yang diinginkan. monitoring membantu mengidentifikasi bidang-bidang di mana kemajuan sedang dibuat, serta bidang-bidang yang membutuhkan lebih banyak upaya. Ini juga membantu untuk mengidentifikasi konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan dan inisiatif, dan untuk menyesuaikannya.

Diketahui bahwa secara keseluruhan, implementasi *SDGs* di Kota Pekanbaru berdampak positif terhadap tujuan pertama pengentasan kemiskinan. Kota Pekanbaru mampu mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab kemiskinan, sekaligus mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ini telah membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan kota yang lebih sejahtera.

Hasil observasi peneliti lakukan ialah mengenai dampak kebijaksanaan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan pertama tanpa kemiskinan di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di kota tersebut. Meskipun kebijakan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Pekanbaru, namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bappedalitbang dan Dinas terkait dalam menangani dampak kebijakan tersebut. Salah satu kelemahan

pemantauan terhadap dampak kebijakan adalah tidak adanya sanksi khusus yang dimiliki oleh Bappedalitbang dan Dinas terkait. Hal ini menyebabkan mereka dalam menangani pemantauan terhadap dampak kebijakan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh Bappedalitbang dan Dinas terkait dalam menangani dampak kebijakan tersebut adalah masalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya mengikuti sosialisasi.

b. Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian dalam monitoring adalah ketika hasil monitoring tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketidaksesuaian dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kesalahan dalam pengumpulan data, kesalahan dalam pemrosesan data, atau karena kurangnya kesesuaian antara hasil monitoring dan tujuan yang diharapkan.

Diketahui bahwa ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan monitoring tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan pertama yang sudah dilakukan sampai saat ini oleh Bappedalitbang Provinsi Riau. Hal ini dapat terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Bappedalitbang Provinsi Riau. Hal ini menyebabkan perencanaan yang telah dilakukan tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Selain itu, adanya keterbatasan waktu dan tenaga kerja yang dimiliki oleh Bappedalitbang Provinsi Riau juga menyebabkan pelaksanaan monitoring tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terkait ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan monitoring tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan pertama oleh Bappedalitbang Provinsi Riau dan Dinas terkait di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan

pelaksanaan monitoring tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan pertama di kota pekanbaru. Salah satu tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. Dalam perencanaan, telah ditetapkan selama 6 bulan sekali yaitu 2 kali semester dalam setahun (Bulan Januari-Juni, semester 1) dan (Bulan Juni-Desember, semester 2) harus dipantau untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut. Namun, dalam pelaksanaan monitoring, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan ini. Pertama, kurangnya waktu antara Bappedalitbang Provinsi Riau dan dinas terkait di Kota Pekanbaru. Hal ini mengakibatkan kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan monitoring yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan teknis dalam pelaksanaan monitoring. Dalam beberapa kasus, staf yang bertanggung jawab atas monitoring tujuan pembangunan berkelanjutan kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memantau pencapaian tujuan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam pengadaan peralatan dan teknologi yang diperlukan dalam proses monitoring.

Faktor penghambat Monitoring Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama Kemiskinan Di Kota Pekanbaru)

Beberapa faktor yang dapat menghambat monitoring pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau dalam studi tujuan pertama kemiskinan di

Kota Pekanbaru dapat meliputi :

1. Kurangnya sumber daya manusia

Jika Bappedalitbang tidak memiliki jumlah atau kualitas staf yang memadai untuk melaksanakan pemantauan, maka hal ini dapat menghambat upaya monitoring. Kurangnya keterampilan atau pengetahuan dalam analisis data dan evaluasi juga dapat menjadi kendala.

2. Keterbatasan anggaran

Jika anggaran yang dialokasikan untuk monitoring terbatas, Bappedalitbang mungkin menghadapi kendala dalam melaksanakan kegiatan pemantauan yang komprehensif dan teratur. Kurangnya sumber daya finansial dapat membatasi kemampuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, mengadakan pertemuan, atau melibatkan pihak eksternal dalam proses monitoring.

3. Kurangnya sumber daya waktu

Jika tidak ada sumber daya waktu yang cukup dalam pelaksanaan monitoring, Bappedalitbang mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh laporan dari instansi yang terkait. Hal ini dapat menghambat akses terhadap data dan informasi yang diperlukan, serta mengurangi pencapaian target berdasarkan hasil monitoring.

4. Ketidakterediaan laporan yang memadai

Jika laporan data yang diperlukan untuk monitoring tidak tersedia atau tidak terkumpul dengan baik, Bappedalitbang akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan pemantauan yang efektif. Ketidakterediaan data dapat terkait dengan kelemahan dalam sistem pelaporan, rendahnya kesadaran atau partisipasi dari pihak terkait, atau kurangnya kemampuan untuk mengumpulkan data yang relevan.

5. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi Monitoring tujuan pembangunan

berkelanjutan sering melibatkan kerjasama antara berbagai instansi dan pemangku kepentingan. Jika tidak ada pemantauan serta pengarahan yang efektif atau kesepakatan kerjasama yang jelas antara Bappedalitbang dan pihak-pihak terkait, pelaksanaan monitoring dapat terhambat. Kurangnya komunikasi dan pengarahan dapat mengakibatkan kesenjangan informasi, *overlap* tugas, atau kurangnya tanggung jawab dalam melaksanakan monitoring.

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan, maka bisa ditarik monitoring pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama Kemiskinan Di Kota Pekanbaru) belum berjalan dengan maksimal dan adanya faktor penghambat monitoring pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama Kemiskinan Di Kota Pekanbaru dalam studi tujuan pertama kemiskinan di Kota Pekanbaru).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ali, Faried, Andi Syamsu Alam dan Sastro M. Wantu. (2012). *Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi iSampel Analisa Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Awang, Azam (2012). *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru Alaf Riau.
- Brodjonegoro, B. S. (2017). *17 Arah Pembangunan Berkelanjutan Ditetapkan*. Retrieved from www.kontan.com: <http://nasional.kontan.co.id/news/17-arrah-pembangunan-bekelanjutan-ditetapkan>.
- Budi, Winarno. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo
- Budihardjo, Eko. 2011 . *Penataan Ruang & Pembangunan Perkotaan*. Bandung: Alumni.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fauzi A. (2004). *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia.
- Islamy, Muh. Irfan. (2017). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Miftah Thoha. (2002). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. (2010). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Simon, A. Herbert. (2004). *Administrative Behavior, Perilaku Administrasi : Suatu Studi Tentang Proses Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi Administrasi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Alih Bahasa ST. Dianjung*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solihin, A.W. (2008). *Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, Edi. (2012). *Administrasi Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan*

- Sosial*). Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syafiie, Inu Kencana. (2015). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zulkifli. et. al. (2013). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR.

B. Jurnal

- Ishartono & Raharjo, T.S. (2015). *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*. Social Work Jurnal. 6 (2),159 –167.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). *Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau*. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6 (1), 77-87.
- Marshella, O., Setya, P & Putra, R. (2020). *Rancang Bangun Sistem Monitoring Sirkulasi Obat Pada Pedagang Besar Farmasi (PBF) Di Kota Bandar Lampung Berbasis Web*. Jurnal Darmajaya.
- Wulandari, Dita. (2015). *Monitoring dan Evaluasi Distribusi Zakat Pada Yatim Mandiri Yogyakarta*. Skripsi
- Rohma, M. (2020). *Usability Testing Fitur Live Chat dan Google Classroom pada Sistem Monitoring*. Jurnal Undar Jombang.

C. Undang-undang

- Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Riau Tahun 2017–2019.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang

- Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.